

## **TUGAS AKHIR**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**Oleh :**

**RENI ELFITRI**

**NIM: 00976008723**

**PROGRAM DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAS SYARIF KASIM  
RIAU  
2013**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

**Oleh**

**RENI ELFITRI**

**NIM 00976008723**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Yang beralamat di JL.Letnan Boyak No.74 Bangkinang.tujuan dari penelitian ini yaitu

Untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor(PKB) yang terjadi di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) kabupaten Kampar.

Dari permasalahan tersebutlah penulis dapat memperoleh data yang diperlukan, dan

Selanjutnya data tersebut di analisis dengan metode kuantitatif yaitu merupakan tehknit analisis data berupa statistic data digunakan yang berbentuk angka.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan diketahui bahwa Tata cara Pelaksanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditetapkan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sudah cukup baik.

**Kata kunci ; Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum, wr, wb*

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan, maha suci Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) Di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar “**. Sholawat serta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi besar SAW. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini Penulis sangat bersyukur karena dalam bentuk kehidupan ini masih diberi rahmat dan kesempatan oleh Allah Subhanahuata'ala maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat spesial dalam hidup ini yaitu Ibunda tercinta Rukiah dan ayahanda Zakaria, dia adalah orang tua yang terbaik dalam memberikan tulus kasih sayang dan motivasi diri, semoga beliau bangga dengan keberhasilan ini.
2. Bapak DR. Mahendra Romous, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan contoh terbaik selaku pemimpin dan seorang yang patut dihargai.

3. Bapak Mahmuzar, M.Hum Selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyani Selaku Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sekaligus menjadi Pembimbing saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk kelancaran dalam penyelesaian tulisan ini.
5. Serta ibu Bapak Dosen yang telah turut serta dalam memberikan masukan dan membantu penulis dalam memberikan ilmu pengetahuan yang teramat berguna, dan seluruh staf dan pegawai pada Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu kelancaran urusan dalam suasana keakraban dan kekeluargaan. Dalam hal ini penulis tidak mungkin dapat menyebutkan satu per satu nama mereka.
6. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang telah banyak memberikan kerjasamanya yang ikut dalam memberikan bantuan data ataupun lainnya dalam menyelesaikan tulisan ini.
7. Tak Lupa pula buat orang yang ku sayang Kakak dan Adek ku yang paling Aku hormati dan sangat aku banggakan dan Seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Untuk Semua teman-teman D3 Administrasi Perpajakan angkatan 2009/2010, **Maisarah, Fatmawati, Devinda, Abu, Iing, Eri, Riandy, syafi'i, Ari, Reni S, Rizki, Eka, Nita, Rahim, Revi, Nurhasmah, Serli, Irfan, Azlan, Amsal,**

**Andika, Berta, Ezi, Ayu, Khairul, Rido, Burhan, Rani, Ranti, Riki, wira,**  
dan **Aldo** yang sudah banyak membantu saya.

9. Dan tak lupa kepada teman di kost Inur, Rina, Ipit, Iros, dan Yona yang selalu member semangat dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Dan Kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut adil selama penulisan ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan . Amin ya Rabbal'alam.

Hanya kepada Allah SWT Subhanahuta'ala penulis berdo'a dan bermohon semoga segala kebaikan dan jerih payah mereka semua mendapatkan balasan yang layak. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pekanbaru, November 2012

Penulis

**RENI ELFITRI**  
**Nim. 00976008723**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Perumusan Masalah .....	7
1.3   Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4   Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Lokasi Penelitian .....	8
1.4.2 Waktu Penelitian .....	8
1.4.3 Jenis Data .....	8
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data .....	9
1.4.5 Analisis Data .....	9
1.5   Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN11</b>	
2.1   Sejarah Singkat Unit Pelaksanaan Teknis .....	11
2.2   Visi Dan Misi Kantor Unit Pelaksana Teknis.....	12
2.3   Struktur Organisasi .....	12
2.4   Uraian Tugas.....	13
<b>BAB III    TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>16</b>
3.1   Tinjauan Teori .....	16
3.1.1 Pengertian Pajak .....	16
3.1.2 Fungsi Pajak .....	18
3.1.3 Pengertian Pajak Daerah .....	18
3.1.4 Pengertian Kendaraan Bermotor (PKB).....	19
3.1.5 Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.	21
3.1.6 Sistem Pemungutan Pajak .....	22

3.1.7 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	24
3.1.8 Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	30
3.1.9 Pajak Dalam Pandangan Islam .....	31
3.2 Tinjauan Praktek .....	33
3.2.1 Analisis Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar.....	33
3.2.2 Kendala Yang dihadapi Oleh Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar.....	37
3.2.3 Solusi Yang dilakukan Oleh Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar .....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
4.1 Kesimpulan .....	40
4.2 Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar Tahun 2009 – 2011 .....	5
Tabel 3.1	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar Tahun 2009 – 2011 .....	38



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembiayaan Negara.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani. Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar, dalam pembangunan tersebut pemerintah telah berkontribusi pajak sebagai salah satu pendapatan yang paling besar untuk membangun suatu daerah. Dalam melaksanakan suatu pembangunan daerah Peran masyarakat sangat penting dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan

mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta salah satu kewajiban kenegaraan sehingga masyarakat wajib berperan aktif dalam melakukan kewajiban nya sendiri.

Sebagaimana diketahui tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Pada, pasal 23 ayat 2 dari Undang-undang Dasar 1945 mengatakan "segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang". Ini berarti bahwa di negara kita sesuatu pungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang, yang lebih lanjut berarti harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Tarif pajak pada prinsipnya ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain – lain, harus

ditetapkan dengan Undang – Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi Ketentuan – ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber – sumber keuangan dengan menetapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , selain yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut diatas dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat wajib pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1998 juncto Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Kalau Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Secara spesifik Kriteria Pajak Daerah diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk mengetahui jumlah Kendaraan Bermotor (KB) yang melakukan pembayaran pajak dan yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor unit UPT di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar Tahun 2009 – 2011**

No	Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak (Unit)	Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak (Unit)
1	2009	378.653	125.305	253.348
2	2010	398.538	113.764	284.774
3	2011	406.980	107.004	299.976

**Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar Tahun 2011**

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui bahwa selama 3 tahun sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terus mengalami kondisi naik turun. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2009 dimana jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 125.305 kendaraan, kemudian pada tahun 2010 sebanyak 113.763 kendaraan dan pada tahun 2011 sebanyak 107.004 kendaraan.

Kondisi naik turun tersebut terjadi dikarenakan banyaknya pemilik Kendaraan Bermotor (KB) yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor (KB) setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Disisi lain, hal ini bisa terjadi dikarenakan banyaknya pemilik Kendaraan Bermotor (KB) yang tidak mengetahui proses pengurusan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor (KB). Sehingga banyak Pajak Kendaraan Bermotor (KB) yang tidak dibayar.

Berdasarkan kondisi tersebut, diketahui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar di antaranya sebagai berikut :

1. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), minimnya informasi yang masyarakat terima serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu sendiri.

Salah satu dampak negative dari hal tersebut adalah menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meskipun sebenarnya wajib pajak sendiri telah memiliki

uang yang cukup untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimilikinya.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tentu akan berakibat pada berkurangnya pendapat pemerintah daerah dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu sendiri. Untuk itu di perlukan adanya partisipasi masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadarannya dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah pelaksanaan pemungutan pajak khususnya yaitu pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, maka penulis mengambil judul tugas akhir ” **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIK (UPT) KABUPATEN KAMPAR** ”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “*Bagaimana Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksanaan Teknis(UPT) Kabupaten Kampar*” ?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terjadi di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) kabupaten Kampar.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada dinas pendapatan daerah kabupaten kampar.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang beralamat di Jl. Letnan Boyak No.74 Bangkinang.

#### **1.4.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan selama 2 bulan terhitung dari bulan maret sampai dengan bulan Desember tahun 2012.

#### **1.4.3 Jenis Data**

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara dengan Kasubag tata usaha para pegawai kantor dan bagian kasir penerimaan



## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penelitian.

### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Metode wawancara

Penulis melakukan wawancara yaitu Tanya jawab langsung dengan Kasubag tata usaha dan karyawan atau staf berbagai narasumber untuk mendapatkan informasi tentang proses pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

#### 2. Metode observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam penerapan pelaksanaan pemungutan kendaraan bermotor di kabupaten Kampar.

#### 3. Metode dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul proposal penulis dan mendokumentasikannya.

### **1.4.5 Analisis Data**

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kuantitatif yaitu merupakan teknik analisis data berupa statistik data digunakan yang berbentuk angka.

Data yang penulis peroleh juga berupa dokumen ,kemudian data tersebut penulis olah sesuai dengan masalah pokok penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelsan ,selanjutnya dianalisis dan dibahas yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti di uraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan masalah tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat dinas/ kantor, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas sub bagian.

#### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini membahas tentang pengertian pajak, pengertian pajak daerah, pengertian kendaraan bermotor dan Sistem pemungutan pajak.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat dan diperlukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **1.1 Sejarah Singkat Unit Pelaksanaan Teknis**

Secara historis pada awalnya kantor UPT Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan SK Gubenur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No. Kpts. 29 Januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat 2 UU No 5 Tahun 1979 Tentang pokok – pokok Pemerintahan di Daerah melalui Perda No. 5 Tahun 1979 Yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana terakhir dengan semangat Otonomi Daerah di dasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 di rubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Berdasarkan amanat PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai Implementasinya di tetapkan Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2008 Tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Data kerja Propinsi Riau ( SOTK ) diantaranya Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan tugas Pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Azaz Otonomi Daerah dan tugas pembantu Bidang Pendapatan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan Penyelenggaraan wewenang yang di perintahkan oleh Pemerintah kepada Gubenur selaku wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi.

## **1.2 Visi Dan Misi Kantor Unit Pelaksana Teknis**

Adapun Visi dan Misi Kantor UPT Kab. Kampar adalah sbb:

### **A. Visi**

Terwujudnya pendapatan daerah sebaagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah propinsi riau secara propesional.

### **B. Misi**

Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal dan menyelenggarakan atau meningkatkan kinerja pelayana publik secara profesional dan memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

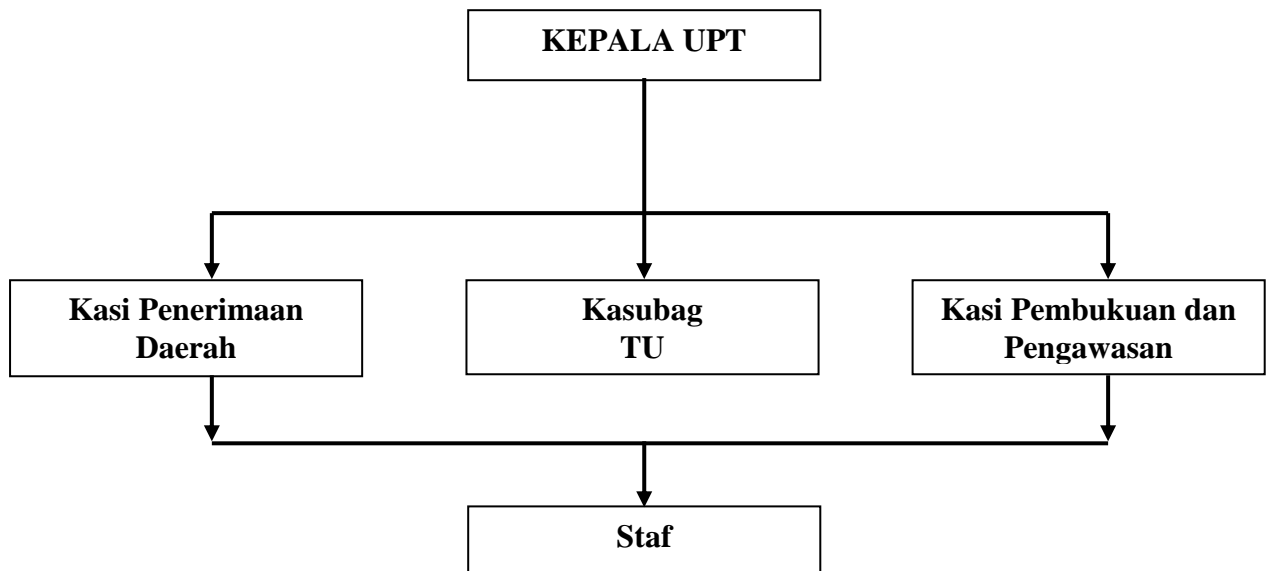
## **1.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian atau unit kerja yaitu sebagai berikut:

1. Kepela unit pelaksana teknis pendapatan kabupaten kampar
2. Kasi pembukuan dan pengawasan
3. Kasi penerimaan pendapatan daerah
4. Kasubag tata usaha
5. Staff

**Gambar 2.1**

**STRUKTUR ORGANISASI UPT DIPENDA KABUPATEN KAMPAR  
PROVINSI RIAU**



*Sumber : Unit Pelaksanaan Teknis Provinsi Riau Kabupaten Kampar.*

#### **1.4 Uraian Tugas**

Kantor Dinas UPT Pendapatan Daerah kampar Mempunyai tugas kerja masing Masing sesuai dengan bidang dan tugasnya sebagaimana telah ditentukan. Adapun tugasnya masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

##### **1. Nama Jabatan : Kepala Kantor**

Tugas pokok dan fungsinya :

- 1) Merumuskan rencana dan strategik dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi dan misi Daerah.
- 2) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya.
- 3) Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas.

- 4) Menetapkan UPT pendapatan dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Menetapkan standar satuan harga dan analisis belanja daerah.
- 6) Menetapkan UPT pendapatan tentang APBD.
- 7) Menentukan pedoman evaluasi anggaran pendapatan dan belanja ( APB ) sesuai pedoman evaluasi yang di tetapkan pemerintah.
- 8) Menetapkan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah pengelolaan investasi dan asset daerah, kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan Mikro kabupaten, kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.
- 9) Menetapkan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggungjawab bersama.

**2. Nama Jabatan :Kasubag Tata Usaha dan Kepala Seksi Penerimaan Daerah**

Tugas pokok dan fungsinya :

- 1) Tugas pokoknya adalah Melaksanakan pemungutan Retribusi, Penagihan Pajak dan Pendapatan asli Daerah Lainnya.
- 2) Menyelenggarakan Pemungutan, Penetapan, Penagihan, Pembukuan dan Penyetoran Pajak Restribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- 3) Memberikan laporan segala kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya Tanggal 10 Bulan berikutnya.

- 4) Memberikan saran – saran Pendapatan dan Pertimbangan mengenai usaha
- usaha untuk meningkatkan Pendapatan Daerah kepada Dinas Pendapatan Provinsi Riau baik diminta atau tidak

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

#### **1.1 Tinjauan Teori**

##### **1.1.1 Pengertian Pajak**

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber –sumber ekonomi.

Pengertian Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. MJH Smeeths dalam H. Buhari (2008:24) pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui nama-nama umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Azhari ( 2010:1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan



undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2008:12) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **1.1.2 Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

#### **1. Fungsi budgetair**

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### **2. Fungsi mengatur**

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### **1.1.3 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Mardiasmo 2009:12).

Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem Official Assessment. Sistem

Official Assessment adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Kalau Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

#### **1.1.4 Pengertian Kendaraan Bermotor (PKB)**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan, termasuk alat-alat yang bergerak (Marihot P. Siahaan, 2005:137).

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta semua gandengannya yang digunakan disemua jenis motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (*undang-undang Republik Indonesia no 28 tahun 2009*). kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.

Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 , yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Pengertian pajak kendaraan bermotor secara umum adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan penggunaan dan pengawasan kendaraan bermotor (Marihot P. Siahaan, 2005:137)

Pengertian pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan / penguasaan kendaraan bermotor (*undang-undang Republik Indonesia no 28 tahun 2009*).

### 1.1.5 Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apakah Negara mempunyai hak memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang yang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a. *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

#### 4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

#### 5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### 1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Dr.Mardiasmo (2002 : 5), dalam bukunya “Perpajakan”, menyatakan bahwa Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System*

Pengertian dan ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak yang terdapat di atas adalah sebagai berikut :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak pasif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 (tiga), (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **1.1.7 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada seseorang atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah (Marihot, 2005 : 10).

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (Liberty, 2002 : 387).

Sedangkan yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan, penggunaan dan pengawasan kendaraan bermotor (Marihot, 2005 : 137).



Menurut (Marihot, 2005 : 139) dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh pihak terkait. Dasar hukum dari pemungutan pajak kendaraan bermotor sendiri adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA).
4. Keputusan Gubernur Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA). Keputusan Gubernur Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) dapat dibuat menyatu, yaitu satu keputusan gubernur untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi juga dapat dibuat secara terpisah.

Sedangkan yang dimaksud dengan objek pajak adalah kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan darat. (Marihot, 2005 : 140).

Pada dasarnya tidak semua Kendaraan Bermotor dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh beberapa pihak sebagai berikut :

1. Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak.
2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak dikecualikan sebagai objek pajak.
3. Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh Subjek Pajak lainnya yang di atur oleh Peraturan Daerah.

Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh Subjek Pajak lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah antara lain :

1. BUMN yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
2. Pabrik atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
3. Kendaraan Dinas seperti kendaraan Pemadam Kebakaran.
4. Orang pribadi yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian.
5. Kendaraan Turis Asing yang berada di Daerah untuk jangka waktu enam puluh hari.
6. Kendaraan Bermotor yang di sita atau di segel oleh Negara.

Demikianlah beberapa jenis objek pajak yang termasuk kedalam beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak atau tidak terkena Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor dan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Menurut Marihot (2008 : 142) wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang berkenaan dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun yang menjadi wakil pajak secara pribadi atas pembayaran pajak terutang.

Marihot (2008 : 142) menambahkan bahwa dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsure pokok, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Adalah nilai jual Kendaraan Bermotor berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga pasar umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sendiri ditentukan oleh :

- a. Isi silinder
- b. Jenis Kendaraan Bermotor
- c. Merek Kendaraan Bermotor
- d. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor
- e. Penggunaan Kendaraan Bermotor

- f. Berat total Kendaraan Bermotor
- g. Dokumen impor atau jenis Kendaraan Bermotor tertentu

## 2. Bobot

Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

- a. Tarif
- b. Tekanan Gandar yang dibedakan atas sumbu, as, roda dan berat Kendaraan Bermotor.
- c. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik dan tenaga surya.
- d. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tidak atau 4 tidak dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah setiap Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, dimana ketetapannya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. 1,5 % untuk Pajak Kendaraan Bermotor bukan umum.
- b. 1 % untuk Pajak Kendaraan Bermotor umum.
- c. 0,5 % untuk Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- d. Besarnya pokok perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan

Pajak, secara umum perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

Nomor registrasi : BM 3329 QN

Nama pemilik : EMIL FUADI

Type : YAMAHA MIO SOUL AL115S A/T

Tahun pembuatan : 2009

Pajak Kendaraan Bermotor yang tertera di STNK: Rp 1.025.000

Rincian Perhitungan:

BBNKB: Rp 850.000

**(Pajak Terutang = Tarif Pajak X Nilai Jual Kendaraan Bermotor)**

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= 10 \% \times \text{Rp } 8.500.000 \\ &= \text{Rp } 850.000\end{aligned}$$

$$\text{PKB} = \text{Rp } 150.000$$

$$\text{SWDKLLJ} = \text{Rp } 25.000$$

$$\text{Total Pajak Terutang} = \text{Rp } 1.025.000$$

Ket:

BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

SWDKLLJ = Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas  
Jalan

Pajak yang terutang merupakan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus di bayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setempat.

Pada Pajak Kendaraan Bermotor terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekali dimuka untuk masa pajak 12 bulan kedepan. Kewajiban pajak berakhir sebelum 12 bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti pajak kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan dapat dilakukan restitusi.

Pengertian sesuatu dan hal di antara hal antara lain Kendaraan Bermotor di daftarkan di daerah lain atau mutasi daerah tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Bermotor yang rusak yang tidak dapat digunakan lagi.

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Provinsi Kendaraan Bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah Provinsi yang hanya terbatas atas Kendaraan Bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

#### **1.1.8 Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Adapun tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Siapkan BPKB, KTP dan STNK asli
2. Foto copi BPKB, KTP dan STNK

3. Minta formulir dan kemudian isi formulir tersebut sesuai dengan data-data kendaraan pemilik yang tertulis di data STNK dan BPKB.
4. Daftarkan melalui loket pendaftaran
5. Setelah dinyatakan lulus persyaratan maka masuk ke proses berikutnya.
6. Melakukan pembayaran dikasir
7. Menunggu penyerahan kembali STNK yang sudah jadi
8. Selesai.

#### **1.1.9 Pajak Dalam Pandangan Islam**

Dalam Islam, masalah pembayaran pajak merupakan salah satu masalah yang cukup serius dan diperhatikan. Hal ini mengingat pembayaran pajak dapat membantu mensejahterakan masyarakat luas jika disalurkan dengan baik dan benar. Begitu pedulinya Islam, sampai-sampai Allah SWT menerangkan dalam Al-qur'an bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau jizyah boleh diperangi karena mereka tergolong orang-orang yang tidak beriman.

Selain itu, Allah SWT juga menerangkan larangan untuk memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan di dalam Al-qur'an Surat Annisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S. Annisa : 29).

Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa memakan harta orang lain dengan jalan bathil itu sangat dibenci oleh Allah apalagi dari hasil pembayaran pajak kendaraan yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak kepada Dinas terkait.

Dan pajak dalam pandangan islam dapat juga kita lihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al- kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk ”.* (Al-Taubah ayat 29).

Yang dimaksud dengan Jizyah adalah Pajak perkepala yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pemahaman islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang



diperintahkan oleh Allah SWT. (ibadah). Jika hal itu bukan perintah , ia tentunya tidak termasuk ibadah.

Demikian pula petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tertentu bernilai Jihad baginya. Sebab, sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan mendapat balasan (QS. Al-Zalzalah : 99 : 7). Dan sebagaimana hadits Rasulullah Saw : Yang artinya : “ Orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai ia kembali kerumahnya “. ( HR. Abu Daud dari Rafi’ bin Khudaij ). Hadis ini di shihkan oleh Al-Albani.

## **1.2 Tinjauan Praktek**

Pada bagian ini, penulis akan mencoba menganalisis variabel-variabel yang dikaji berdasarkan teori-teori yang ada setelah data dikumpulkan. Proses analisis data ditujukan untuk menemukan suatu hasil atau hal apa yang sebenarnya terdapat di lokasi penelitian, sehingga penulis dapat menarik suatu kesimpulan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dilapangan dan kemudian memberikan saran yang sekiranya berguna dan bermanfaat kepada pihak terkait.

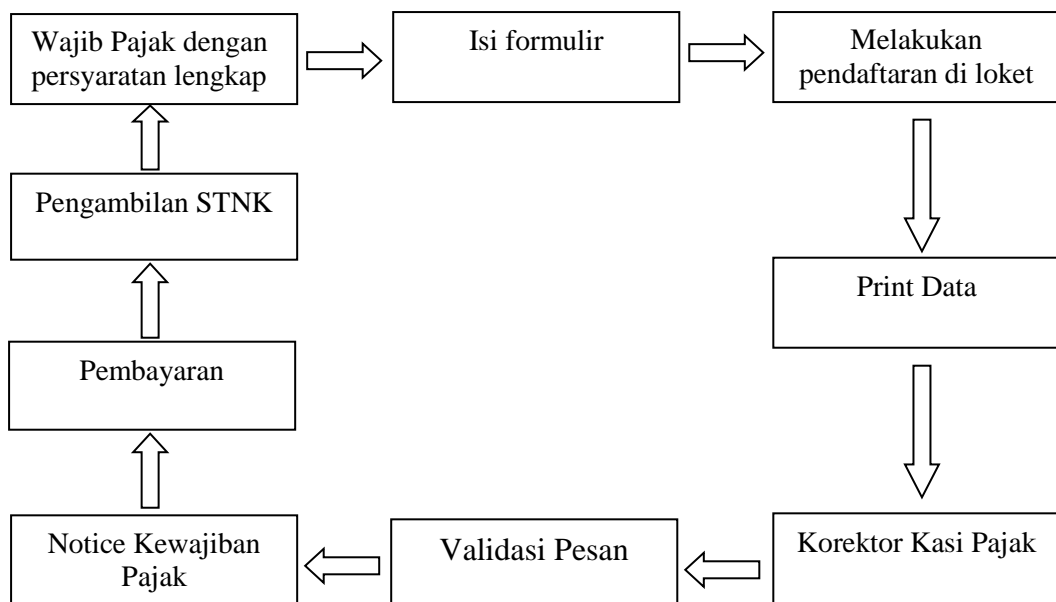
### **3.2.1 Analisis Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar**

Berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, setiap pemilik Kendaraan Bermotor wajib membayar pajak. Kendaraan Bermotor setiap tahun wajib memperpanjang STNK selama 5 tahun. Adapun tata cara pemungutan

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kabupaten Kampar dapat di lihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 3.1. Bagan Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**



**Sumber : Unit Pelaksanaan Teknis Provinsi Riau Kabupaten Kampar.**

Berdasarkan bagan proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di atas, dapat jelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pendaftaran

Untuk mengetahui besarnya Pajak Kendaraan Bermotor, maka harus dilakukan pendaftaran objek pajak terlebih dahulu. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) sesuai dengan identitas Kendaraan Bermotor dan identitas wajib pajak.
- b. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja saat kepemilikan dan atau penguasaan. Untuk Kendaraan Bermotor Baru

sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi Kendaraan Bermoto lama, sedangkan untuk Kendaraan Bermotor pindahan dari luar daerah adalah 30 hari sejak tanggal surat fiskal antar daerah dikeluarkan.

- c. Jika terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik itu perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin Kendaraan Bermotor, maka wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.

## 2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan setelah diketahui dengan jelas dan pasti objek pajak dan subjek pajak, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

## 3. Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh wajib pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak dapat diangsur, melainkan harus dilunasi sekaligus untuk 12 bulan atau 1 tahun penuh.
- b. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterbitkannya SKPD.
- c. Tanda pelunasan pajak diberikan kepada wajib pajak setelah pelunasan dilakukan.

## 4. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan jika wajib pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor. Adapun pelaksanaan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berlaku.
- b. Jika dalam 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat sejenisnya dikeluarkan, maka wajib pajak harus melunasi Pajak Kendaraan Bermotornya.

#### 5. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak segera melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, berupa :
  - i. Kenaikan 2 % dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
  - ii. Jika tetap tidak melakukan pendaftaran dan pendataan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lebih dari 12 bulan, maka akan dikenakan denda sebesar 25 % dari Pokok Pajak terhutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terhutangnya Pajak Kendaraan Bermotor.

iii. Jika berdasarkan pemeriksaan dibidang perpajakan tidak dibayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan denda sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi ini tidak berlaku jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum tindakan pemeriksaan dilakukan oleh petugas terkait.

b. Sanksi Pidana, berupa :

- 1) Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling besar 2 kali dari jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang.
- 2) Jika tindakan wajib pajak menyebabkan kerugian daerah, maka akan dikenakan Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan atau denda paling besar 4 kali dari jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang.

### **3.2.2 Kendala Yang dihadapi Oleh Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar**

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar Tahun 2009 – 2011**

No	Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak (Unit)	Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak (Unit)
1	2009	378.653	125.305	253.348
2	2010	398.538	113.764	284.774
3	2011	406.980	107.004	299.976

*Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar Tahun 2011.*

Berdasarkan tabel 3.1 di atas diketahui bahwa selama 3 sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terus mengalami kondisi yang berfluktuasi. Hal ini bisa di lihat dari tahun 2009 dimana jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 125.305 kendaraan, kemudian pada tahun 2010 sebanyak 113.763 kendaraan dan pada tahun 2011 sebanyak 107.004 kendaraan.

### **3.2.3 Solusi Yang dilakukan Oleh Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar**

Terkait dengan beberapa kendala yang dialami oleh pelaksana pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar, maka Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar sendiri melakukan beberapa kebijakan atau langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat**

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya wajib pajak mengenai prosedur pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) merupakan salah satu kebijakan atau langkah-langkah konkrit yang telah dilaksanakan oleh UPT Kabupaten Kampar agar masyarakat mengetahui lebih jauh mengenai prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimilikinya.

2. Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan

Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan adalah salah satu upaya konkrit yang saat ini telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan cara ini, setiap masyarakat yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan terpaksa akhirnya akan melakukan kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

3. Memberikan Sanksi berupa denda

Dengan cara memberikan sanksi kepada masyarakat wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak baik itu berupa sanksi secara administrasi berupa denda sebesar 2 atau 4 kali lipat dari kewajiban pajak diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan sedikitnya masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditetapkan oleh Pelaksana Teknis (UPT) sudah cukup baik.
2. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Jumlah Kendaraan Bermotor (PKB) yang tidak melakukan pembayaran Kendaraan Bermotor setiap tahunnya terus mengalami kondisi yang befluktuasi, sedangkan jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kampar dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.
4. Langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat



- b. Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan
- c. Memberikan Sanksi berupa pidana maupun denda

## **1.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya berguna dan bermanfaat bagi pihak terkait. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi terjadinya penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka perlu dilakukan hubungan kerja sama yang baik dengan pihak terkait seperti polisi dan Dinas Perhubungan.
2. Perlu dilakukan beberapa metode terbaru yang dapat memudahkan masyarakat wajib pajak untuk mengetahui serta melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) miliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani dalam santoso brotodihardjo, *Penghantar Ilmu Hukum Pajak*, Tahun 1991.
- Azhari. *Perpajakan I (pajak Penghasilan)*. UR Press Pekanbaru, 2010. Bohari. *Pengantar perpajakan*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.
- Mardiasmo. *Perpajakan* edisi Revisi 2008.
- Erli Suwandi, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Himpunan Peraturan Tentang Pajak, Solo, CV. Mayasari*, 1995.
- Y. Pudyamoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Jogjakarta, 2009.
- Soeparman Soemahamidjaja, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royvng*, Bandung. 1964.
- Pja. Andriani dalam Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 1991. Marihot p. Siahaan, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Unclang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah beserta penjelasannya, 2009.
- Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2000.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. 2001.